

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi pada DPKKD Kabupaten Aceh Utara)

Ismail dan Neo Agustina

Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah memasuki suatu era transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut ditandai dengan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Format laporan keuangan ini yang sajikan oleh pemerintah ini sangat berbeda dengan format laporan keuangan yang lalu. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan berbagai kegiatan instansi pemerintah, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah hanya terdiri dari laporan relisasi anggaran saja. Fenomena ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sebagai tindak lanjut dari format laporan keuangan yang baru, pemerintah kemudian mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang standar akuntansi keuangan pemerintah.

Standar ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar, termasuk didalamnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Bagi para pengawas keuangan negara, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya.

Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Terutama dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan pemerintah diharapkan terdapat sistem pengelolaan keuangan negara secara akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2002).

Dengan ketersediaan laporan keuangan pemerintah yang mengacu pada akuntansi pemerintah, maka berbagai ketimpangan dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan laporan yang disajikan oleh pengelola keuangan di DPKKD Kabupaten Aceh Utara.

Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan keuangan publik oleh instansi pemerintah daerah penerapan akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada DPKKD Kabupaten Aceh Utara, di mana selama ini sumber anggaran untuk DPKKD Kabupaten Aceh Utara bersumber dari APBD Aceh Utara dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan karena menurut peneliti masalah tersebut merupakan masalah

yang sangat relevan bagi Pemerintah saat ini.

Penerapan akuntansi pemerintah yang baik pada DPKKD Kabupaten Aceh Utara akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan DPKKD Kabupaten Aceh Utara diharapkan akan dapat memperbaiki pencapaian kinerja laporan keuangan pada DPKKD Kabupaten Aceh Utara sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal.

B. Landasan Teori

1. Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan yang disebutkan oleh Harahap (2008) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas

ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Disajikan secara sistematis sesuai dengan Stándar Akuntansi Pemerintahan, di mana setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Bagi setiap kegiatan keuangan menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2007; Hapsari, 2007). Menurut Atril dan

McLaney (1991) dalam Saidin (2007) menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan biaya/manfaat. Ditegaskan bahwa relevan dan dapat diandalkan dari pelaporan keuangan dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat, namun jika laporan keuangan tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dimengerti dan tidak tepat waktu, biaya yang lebih besar dari manfaat maka akan mengurangi manfaatnya.

Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

3. Sistem Informasi Akuntansi

Secara umum, penggunaan sistem akuntansi manajemen terbatas hanya pada informasi keuangan internal yang berorientasi historis. Namun, saat ini meningkatnya peran sistem akuntansi manajemen untuk membantu peran manajer dalam perencanaan, pengarahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan telah mengakibatkan perubahan pada sistem akuntansi manajemen. Saat ini dalam perkembangannya pada sistem akuntansi manajemen terdapat perubahan dengan memasukan data

eksternal dan non keuangan ke dalam informasi yang berorientasi masa depan.

Kriteria tersebut fleksibel dan berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai manajemen. Sistem akuntansi manajemen mempunyai tiga tujuan umum, yaitu (1) menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk dan tujuan lain yang diinginkan manajemen, (2) menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan dan (3) menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan satuan ukuran uang, dan digunakan untuk membantu pelaksanaan operasional perusahaan (Mulyadi, 1999). Akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Disamping menghasilkan informasi keuangan masa lalu, akuntansi manajemen juga menyediakan informasi keuangan masa yang akan datang sebagai salah satu dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Menurut Artkinson *et al.* (dikutip dari Rizna, 2009), akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer dalam pembuatan keputusan yang baik. Banker *et al* (dalam Rizna, 2009), mengemukakan secara tradisional informasi sistem akuntansi manajemen didominasi oleh

informasi keuangan saja, namun ada perkembangan informasi non keuangan juga menentukan.

Hasil penelitian Chenhall dalam Rizna (2009), menemukan bukti empiris mengenai karakteristik informasi Sistem Akuntansi Manajemen yang bermanfaat yaitu *broadscope*, *timeliness*, *aggregation*, dan *integration*. Penelitian Gul dalam Rizna (2009), keempat karakteristik informasi Sistem Akuntansi Manajemen tersebut diinteraksikan dengan *perceived environmental uncertainty* yang mempengaruhi kinerja manajerial. Mengidentifikasi empat karakteristik informasi SAM yaitu sebagai berikut :

a. Broadscope

Di dalam sistem informasi, *broad scope* mengacu pada dimensi focus, kuantifikasi dan horizon waktu (Gordon dalam Muslichah, 2002). Sistem akuntansi manajemen tradisional memberikan informasi yang terfokus pada peristiwa-peristiwa dalam organisasi yang dikuantifikasi dalam ukuran moneter dan yang berhubungan dengan data historis.

Lingkup sistem akuntansi manajemen yang luas memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan eksternal yang mungkin bersifat ekonomi seperti *Gross National Product*, total penjualan pasar dan pangsa pasar suatu industri, atau mungkin juga bersifat non ekonomi seperti faktor demografi, cita rasa konsumen, tindakan para pesaing dan perkembangan teknologi. Lingkup akuntansi manajemen yang luas mencakup ukuran nonmoneter terhadap karakteristik lingkungan eksternal (Gordon dalam Muslichah, 2002). Di samping itu, lingkup sistem akuntansi

manajemen yang luas akan memberikan estimasi tentang kemungkinan terjadinya peristiwa di masa yang akan datang dalam ukuran probabilitas.

b. Timeliness

Kemampuan para manajer untuk merespon secara cepat atas suatu peristiwa kemungkinan dipengaruhi oleh *Timeliness* sistem akuntansi manajemen. Informasi yang *timeliness* meningkatkan fasilitas SAM untuk melaporkan peristiwa paling akhir dan untuk memberikan umpan balik secara tepat terhadap keputusan yang dibuat. Jadi *timeliness* mencakup frekuensi pelaporan dan kecepatan pelaporan. Menurut Chia dalam (Muslichah, 2002), menyatakan bahwa *timing* informasi menunjuk pada jarak waktu antara permintaan dan tersedianya informasi dari SAM ke pihak yang meminta.

c. Aggregation

Sistem akuntansi manajemen memberikan informasi dalam berbagai bentuk agregasi yang berkisar dari pemberian bahan dasar, data yang tidak diproses hingga berbagai agregasi berdasarkan periode waktu atau area tertentu misalnya pusat pertanggungjawaban atau fungsional lain. Tipe agregasi yang lain mengacu pada berbagai format yang konsisten dengan model keputusan formal seperti analisis *cash flow* yang didiskontokan untuk anggaran modal, simulasi dan *linier programming* untuk penerapan anggaran, analisis laba dan rugi dan analisis pengendalian intern.

Dalam perkembangan terakhir, agregasi informasi merupakan penggabungan informasi fungsional dan temporal seperti area penjualan, pusat biaya, departemen produksi dan

pemasaran dan informasi yang dihasilkan secara khusus untuk model keputusan formal.

d. Integration

Aspek pengendalian suatu organisasi yang penting adalah koordinasi berbagai segmen dalam sub-sub organisasi. Karakteristik SAM yang membantu koordinasi mencakup spesifikasi target yang menunjukkan pengaruh interaksi segmen dan informasi mengenai pengaruh keputusan pada operasi seluruh subunit organisasi. Menurut Chia dalam (Muslichah, 2002), menyatakan bahwa informasi yang terintegrasi dari SAM dapat digunakan sebagai alat koordinasi antar segmen dari subunit dan antar subunit.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah :

1. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
2. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
3. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
4. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governemen; dan
5. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

1. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
2. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
3. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
 - a. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
 - b. Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

Secara umum SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP, 2008), yaitu:

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
2. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di instansi terkait;
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan,

pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :

1. Penganggaran
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. Penatausahaan
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Surat Tanda Setoran (STS);
 - e. Register; dan
 - f. Surat pengendalian lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Jurnal;
 - b. Buku besar;
 - c. Buku pembantu;
 - d. Laporan realisasi anggaran;
 - e. Laporan arus kas; dan
 - f. Neraca.

Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan :

- a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran;
- b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan;

- c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; dan
- d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan.

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan dalam pelaporan keuangan daerah adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian, yaitu kuantitatif, maka setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi sebagai upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Teknik analisa data yang digunakan adalah model regresi linear sederhana dengan persamaan :

$$y = a + bx + e$$

di mana :

y = Penerapan sistem informasi akuntansi

a = konstanta

b = koefisien regresi

x = kualitas laporan keuangan

e = error

D. Pembahasan

1. Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier sederhana, pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah seperti ditunjukkan pada tabel 4.11 di bawah ini :

Tabel 4.10
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.710	1.939		6.565	.000
Penerapan SIA	.454	.080	.536	5.672	.000

Sumber : Data diolah SPSS versi 16.0, 2014

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS seperti terlihat pada tabel 4.10 di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = 12.710 + 0,454X$$

Persamaan regresi sederhana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a = 12.710 merupakan nilai konstanta, jika nilai variabel penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_1) adalah nol, maka kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 12.710.

$b_1 = 0.454$ menunjukkan variabel penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y), dengan kata lain jika penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_1) ditingkatkan 1 point maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,454 point.

2. Koefisien Korelasi di Determinasi

Tabel 4.11
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.536 ^a	.287	.278	2.193

Sumber: *Data diolah SPSS versi 16.0, 2013*

Dari tabel 4.12 menunjukkan korelasi (R) antara variabel penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X) dengan variabel Kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0.536. Dalam hal ini, karena regresi linier sederhana di mana variabel bebasnya hanya ada satu, maka dapat dikatakan bahwa korelasi (R) antara penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X) dengan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0.536 yang

berarti adanya ikatan yang kuat hubungan (korelasi) antara penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk dapat memberikan penafsiran koefisien korelasi (R) maka dapat berpedoman pada ketentuan di bawah ini:

Tabel 4.12

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber: *Sugiyono (2005:183)*

Berdasarkan tabel 4.12 juga memperlihatkan nilai koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,287. Hasil ini berarti bahwa pnerapan sistem informasi akuntansi (X) mampu

mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Y) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara sebesar 28,7%. Sedangkan sisanya 71,3% (100%-

28.7%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Pembuktian Hipotesis

Tabel 4.13
Uji Parsial (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.710	1.939		6.565	.000
Penerapan SIA	.454	.080	.536	5.672	.000

Sumber : *Data diolah SPSS versi 16.0, 2014*

Untuk uji signifikansi penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara digunakan uji t (uji student) atau uji parsial digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel X terhadap Y. Sampel yang digunakan sebanyak 82 orang, sehingga pengujian menggunakan uji t dengan $df = n - k$ atau $df = 82 - 2 = 80$ dan tingkat signifikansi (α) = 5% maka diperoleh t tabel sebesar 1.990 dengan kriteria pengujian :

- Jika t hitung > t tabel, maka variabel X mempunyai keeratan hubungan yang signifikan terhadap Y.
- Jika t hitung < t tabel, maka variabel X tidak mempunyai keeratan hubungan yang signifikan dengan variabel Y.

Berdasarkan pada tabel 4.13 dapat dilihat hasil perhitungan sebagai berikut:

Hasil perhitungan untuk variabel penerapan sistem informasi akuntansi yang menghasilkan t hitung sebesar 5.672 dengan signifikansi 0.000 di mana nilai ini lebih besar dari t tabel 1.990. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Maka hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan faktor penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara telah terbukti dan dapat diterima.

E. Kesimpulan

1. Penerapan sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh

Utara. Ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi linear untuk variabel sistem informasi akuntansi yang bernilai positif, yaitu nilai t hitung (5.672) > t tabel (1.990). Sehingga dengan sendirinya akan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

2. Hasil perhitungan untuk variabel penerapan sistem informasi akuntansi yang menghasilkan t hitung (5.672) lebih besar dari t tabel (1.990), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini diketahui dari nilai perhitungan dengan SPSS versi 16.0.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat
- Arikunto, 2002. *Prosedur penelitian satu pendekatan praktek*, Yogyakarta, Rineka Cipta
- Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*.Yogyakarta, BPFE.
- Hadiati, Sri, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Henry Simamora. 2000. *Akuntansi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta, Salemba Empat.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
- Muhammad Gade. 2000. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Liang, Gie The, 2001, *Unsur-unsur Administrasi*, Yogyakarta, Bina Aksara.
- Siagian. SP, 2001, *Pengawasan dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Yadiati, Winwin. 2007, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta, Kencana.